

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 memuat indikasi program prioritas yang mendukung langsung pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan 2013-2018, dan program pembangunan yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Indikasi rencana program prioritas dengan kerangka pendanaan tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut.

8.1 Rencana Program Prioritas

Rencana program prioritas merupakan sekumpulan program pembangunan yang menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018. Penetapan program prioritas memperhatikan urusan wajib dan urusan pilihan, tugas pokok dan fungsi SKPD, dan peran aktif Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan memperhatikan pembagian tugas pokok dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pelaksanaan program prioritas adalah sebagai berikut.

8.1.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Misi Kesatu

Rencana program prioritas untuk mewujudkan Misi Kesatu RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018.

Tabel 8. 1

Rencana Program Prioritas Misi Kesatu: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
RPJMD Sumatera Selatan 2013-2018

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab	
1.1 Meningkatkan produksi	Pembangunan Pertanian	Urusan Perencanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Balitbangnovda • Dinas Pertanian, TPH • Dinas Perkebunan • Bakorluh • Dinas Kehutanan • Dinas Kelautan dan Perikanan 	
1.2 Meningkatkan kemampuan SDM di sektor pertanian		(1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		
1.3 Meningkatkan jumlah rumah tangga jasa (UMKM) di sektor pertanian		(1) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan		
1.4 Meningkatkan pendapatan masyarakat dari usaha pertanian		(2) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura		
1.5 Meningkatkan pendapatan daerah dari usaha pertanian		(3) Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura		
		(4) Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura		
		(5) Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing, Pemasaran dan Industri Hasil Pertanian		
		(6) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian		
		(7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan		
		(8) Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan		
		(9) Program Proteksi Tanaman Perkebunan		
		(10) Program pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan/P2HP		

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
		(11) Program pengembangan kelembagaan usaha perkebunan/PKUP (12) Program Pengembangan Sentra-sentra Produksi Perkebunan (13) Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak (14) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (15) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan (16) Program Pengembangan Informasi dan Statistik Peternakan (17) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan (18) Program Pengembangan Kerjasama Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (19) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Pertanian (20) Program Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna (21) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Perikanan (22) Program Pengembangan Teknologi Perikanan Tepat	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
		<p>Guna (23) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Kehutanan</p> <p>(24) Program Pengembangan Teknologi Kehutanan Tepat Guna</p> <p>Urusan Kehutanan (1) Program peningkatan produksi kayu dari HTI (2) Program peningkatan penerimaan sub sektor kehutanan (3) Program Peningkatan Produksi Industri Kayu Hulu</p> <p>Urusan Kelautan dan Perikanan (1) Program pemberayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan (2) Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan (3) Program Pengembangan BBI Sentral Air Tawar dan BBI Lokal Provinsi Sumatera Selatan (4) Program Optimalisasi laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan (LPPMHP)</p>	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
2.1 Meningkatkan IKM berbasis pertanian	Investasi dan Pengembangan Usaha	Urusan Perencanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas Koperasi, UKM • BP3MD • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.2 Meningkatkan kesempatan kerja di sektor industri		(1) Program Kerjasama Pembangunan	
2.3 Meningkatkan pengolahan produk IKM		Urusan Koperasi dan UKM	
2.4 Meningkatkan pendapatan masyarakat dari usaha IKM		(1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
2.5 Meningkatkan pendapatan daerah dari usaha industri pengolahan		(2) Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi UKM	
3.1 Berkembangnya jasa pariwisata		Urusan Penanaman Modal	
3.2 Meningkatkan kesempatan kerja di sektor pariwisata		(1) Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi	
3.3 Meningkatkan nilai tambah objek wisata		(2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	
3.4 Meningkatkan pendapatan masyarakat dari usaha pariwisata		Urusan Pariwisata	
3.5 Meningkatkan pendapatan daerah dari usaha pariwisata		(1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
4.1 Meningkatkan produksi pertambangan		(2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
4.2 Meningkatkan nilai tambah sektor pertambangan		(3) Program Pengembangan Kemitraan	
4.3 Meningkatkan pendapatan daerah dari usaha pertambangan		Urusan Perdagangan	
5.1 Meningkatkan pendapatan daerah dari perusahaan daerah		(1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	
5.2 Meningkatkan pendapatan		(2) Program	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
<p>6.1 perusahaan daerah Berkembangnya kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Api-api</p> <p>6.2 Meningkatnya investasi</p> <p>6.3 Berkembangnya Klaster Industri Unggulan Daerah (KIUD)</p>		<p>Peningkatan Iklim Usaha Perdagangan (3) Program Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Perdagangan (4) Program Peningkatan Sarana/Prasarana Perdagangan (5) Program Penguatan Sistem Logistik Daerah (6) Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (7) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor (8) Program Sistem Informasi Pengembangan Kemitraan</p> <p>Urusan Perindustrian (1) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri (2) Program Pengembangan Klaster Industri (3) Program Peningkatan Kapasitas Iptek sistem Produksi (4) Program Pengembangan dan Pembinaan Ovop (5) Program Pengembangan Industri Kreatif</p>	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
7.1 Meningkatkan mobilitas barang antarwilayah	Infrastruktur dan Energi	Urusan Pekerjaan Umum (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU Bina Marga • Dinas PU Cipta Karya • Dinas PU Pengairan • Dinas Perhubungan, Kominfo • Dinas Pertambangan dan Energi
7.2 Meningkatkan perdagangan antarwilayah		(2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
8.1 Terbangunnya jalan dan jembatan		(3) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	
8.2 Terbangunnya prasarana, sarana dan jaringan transportasi yang terpadu dan merata		(4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	
8.3 Meningkatkan mutu pengelolaan lalu lintas		(5) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	
8.4 Terbangunnya prasarana dan sarana permukiman yang sehat dan layak huni		Urusan Perumahan Rakyat (1) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	
8.5 Meningkatkan pelayanan daerah rawan sanitasi			
9.1 Menguatnya sistem inovasi daerah (SIDa)		Urusan Penataan Ruang (1) Program Perencanaan Tata Ruang	
9.2 Berkembangnya jaringan IPTEKIN		(2) Program Penataan Bangunan	
9.3 Berkembangnya bisnis inovatif		(3) Program Penataan Kawasan	
9.4 Berkembangnya IPTEKIN strategis daerah		(4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
		Urusan Perhubungan (1) Program Pengembangan Lalu Lintas dan	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
		<p>Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <p>(2) Program Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)</p> <p>(3) Program Pengembangan Transportasi Udara</p> <p>(4) Program Penaggulangan Kelebihan Muatan (<i>Over Loading</i>)</p> <p>(5) Program Pengembangan Transportasi Perkotaan</p> <p>(6) Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut</p> <p>(7) Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Kereta Api</p> <p>(8) Program Laik Jalan Kendaraan Bermotor</p> <p>Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>(1) Program Pengusahaan Pertambangan dan Peningkatan Produksi Batubara</p> <p>(2) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Geologi ESDM</p>	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
		(3) Program Pemanfaatan dan Pengusahaan Migas (4) Program Pemanfaatan Energi untuk Kebutuhan Listrik bagi Masyarakat	

8.1.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Misi Kedua

Rencana program prioritas untuk mewujudkan Misi Kedua RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018.

Tabel 8. 2

Program Prioritas Misi Kedua: Memantapkan Stabilitas Daerah
RPJMD Sumatera Selatan 2013-2018

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggungjawab	
10.1 Terwujudnya ketahanan pangan daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keamanan dan Ketertiban masyarakat	(1) Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Ketahanan Pangan • Sekretariat Korpri • Badan Kepegawaian Daerah • Badan Diklat • Bappeda • Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia • Biro Kesejahteraan Rakyat • Biro Organisasi dan Tatalaksana • Sekretariat DPRD • Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah • Dinas Pendapatan Daerah • Inspektorat Provinsi • Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah • Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 	
10.2 Terwujudnya ketahanan energy daerah				(2) Program Peningkatan SDM dan Teknologi Pangan
11.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan adil				
11.2 Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi publik		(3) Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya		
11.3 Berkembangnya perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan berbasis kinerja		Urusan Kepegawaian		
		(1) Program Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif		
		(2) Program Penguatan Organisasi KORPRI		
11.4 Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai		(3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/ KORPRI		
		(4) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga dan Kesehatan Jasmani Bagi PNS/Anggota KORPRI		
11.5 Meningkatkan		(5) Program Peningkatan Disiplin Aparatur		

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggungjawab
11.6 solidaritas, ketahanan dan modal social budaya masyarakat Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah		(6) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Urusan Perencanaan (1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Arsip Daerah • KPID • Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik • Satuan Polisi Pamong Praja
12.1 Terwujudnya tatanan politik dan pemerintahan yang bertumpu pada profesionalisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kearifanl okal		Urusan Pemerintahan (1) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan (2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah (3) Program Perumusan Kebijakan di Bidang Keagamaan (4) Program Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan	
12.2 Terlaksananya pemilihan kepala daerah (Pilkada) pemilihan umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil		(5) Perumusan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (6) Program Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga (7) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (8) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat (9) Program Peningkatan dan Pengembangan Peng. Keuangan dan Aset Daerah (10) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota (11) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (12) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat (13) Program Litbang dan Inovasi Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Urusan Pembedayaan Masyarakatan dan Desa	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggungjawab
		<p>(1) Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</p> <p>Urusan Kearsipan</p> <p>(1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</p> <p>(2) Program Peningkatan Pelayanan Informasi</p> <p>Urusan Komunikasi dan Informatika</p> <p>(1) Program Peningkatan Kelembagaan KPID Dok/Arsip Daerah</p> <p>(2) Program Pengawasan Isi Siaran</p> <p>(3) Program Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran</p> <p>(4) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa</p> <p>(5) Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi</p> <p>(6) Program Pengemb. Aplikasi Telekomunikasi</p> <p>Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</p> <p>(1) Program Pengemb.Wawasan Kebangsaan</p> <p>(2) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p> <p>(3) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingk.</p> <p>(4) Program Pendidikan Politik Masyarakat</p> <p>(5) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal</p> <p>(6) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman serta perlindungan masyarakat</p>	

8.1.3 Indikasi Rencana Program Prioritas Misi Ketiga

Rencana program prioritas untuk mewujudkan Misi Ketiga RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018.

Tabel 8. 3

**Program Prioritas Misi Ketiga: Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan
RPJMD Sumatera Selatan 2013-2018**

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
13.1 Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya	Urusan Kesehatan (1) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan • RS. DR.Ernaldi Bahar • Badan Pemberdayaan Perempuan • Dinas Sosial • Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi • Dinas Pemuda dan Olahraga • Badan Perpustakaan Daerah • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • BPMPD • Bappeda
13.2 Meningkatnya status kesehatan jiwa masyarakat		(2) Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan	
13.3 Meningkatnya status gizi masyarakat		(3) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS, RS JIWA, RS PARU dan RS MATA	
13.4 Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi		(4) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA	
13.5 Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemic		(5) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan LANSIA	
13.6 Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan		(6) Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	
14.1 Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah		(7) Program Penanganan Keluarga Berencana	
14.2 Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah	Urusan Pendidikan (1) Peningkatan Pendidikan Non Formal		
14.3 Meningkatnya keterampilan siswa SMA	(2) Program Pendidikan Luar Biasa		
14.4 Meningkatnya	(3) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
	(4) Program Manajemen Pelayanan		

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
<p>jumlah dan mutu lulusan perguruan tinggi</p> <p>14.4 Meningkatnya minat baca masyarakat</p> <p>14.5 Tertatanya dokumen dan arsip daerah</p> <p>15.1 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk</p> <p>15.2 Terwujudnya keluarga sejahtera</p> <p>16.1 Berkembangnya mutu dan layanan kegiatan kepemudaan</p> <p>16.2 Berkembangnya kewirausahaan para pemuda</p> <p>16.3 Meningkatnya prestasi pemuda di bidang seni dan budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>17.1 Berkembangnya industri olahraga, jasa, peralatan dan partisipasi masyarakat</p> <p>18.1 Meningkatnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</p> <p>18.2 Meningkatnya</p>		<p>Pendidikan</p> <p>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>(1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak</p> <p>(2) Program Kelembagaan PUG dan Anak</p> <p>(3) Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</p> <p>(4) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</p> <p>(5) Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak</p> <p>Urusan Sosial</p> <p>(1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <p>(2) Program Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial</p> <p>(3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <p>Urusan Ketenagakerjaan</p> <p>(1) Program Peningkatan Kualitas</p>	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
<p>peran perempuan dalam pembangunan 18.3 Meningkatnya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak</p>		<p>dan Produktivitas Tenaga Kerja (2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja (3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</p> <p>Urusan Transmigrasi (1) Program Transmigrasi Lokal (2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (3) Program Transmigrasi Sumsel</p> <p>Urusan Kepemudaan dan Olahraga (1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan (2) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga (3) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga (4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (5) Program Kepanduan/Kepramu kaan</p> <p>Urusan Perpustakaan (1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</p>	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
		Urusan Kebudayaan (1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya (2) Program Pengembangan Nilai Budaya (3) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (4) Program Permuseuman dan Nilai-nilai Budaya Sumsel Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Urusan Perencanaan Pembangunan (1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah (2) Program Perencanaan Pembangunan Sosial	
19.1 Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian 19.2 Berkurangnya pengangguran tenaga kerja 19.3 Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat 20.1 Berkembangnya wilayah perdesaan dan kawasan	Prioritas Penanggulangan Kemiskinan	Urusan Pendidikan (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (3) Program Pendidikan Menengah Urusan Kesehatan (1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat (3) Program	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan • Dinas Pemuda dan Olahraga • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Koperasi, UKM • Dinas PU CK • Dinas PU Pengairan • Dinas Pertanian • Dinas Perkebunan • Dinas Kelautan dan Perikanan • Badan ketahanan Pangan

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
<p>transmigrasi</p> <p>20.2. Terwujudnya percepatan pembangunan daerah perdesaan, terpencil dan tertinggal</p> <p>21.1 Menurunnya angka kemiskinan</p> <p>22.1 Berkembangnya kelompok masyarakat, organisasi dan lembaga masyarakat desa</p> <p>22.2 Terwujudnya perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa</p> <p>22.3 Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa</p> <p>23.1 Meningkatnya surplus usaha koperasi</p> <p>23.2 Meningkatnya pendapatan pelaku UMKMK</p>		<p>Pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>(4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>(5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <p>(6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat</p> <p>(7) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</p> <p>(8) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</p> <p>(9) Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Ibu dan Anak</p> <p>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>(1) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</p> <p>(2) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Peningkatan Imtaq dan Iptek Kepemudaan serta Penanggulangan HIV-AIDS</p> <p>Urusan Ketenagakerjaan</p> <p>(1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja</p> <p>Urusan Koperasi dan UKM</p> <p>(1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan</p>	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
		<p>Keunggulan Kompetitif UKM</p> <p>(2) Program Perkuatan Permodalan UMKMK</p> <p>(3) Program Peningkatan Kegiatan Usaha UMKMK</p> <p>(4) Program Peningkatan Pemasaran Hasil UMKMK</p> <p>Urusan Perumahan Rakyat</p> <p>(1) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</p> <p>(2) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</p> <p>Urusan Pekerjaan Umum</p> <p>(1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</p> <p>Urusan Pertanian</p> <p>(1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian</p> <p>(2) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan</p> <p>Urusan Kelautan dan Perikanan</p> <p>(1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya</p>	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
		(2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap Urusan Ketahanan Pangan (1) Program Peningkatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan (2) Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	

8.1.4 Indikasi Rencana Program Prioritas Misi Keempat

Rencana program prioritas untuk mewujudkan Misi Keempat RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018.

Tabel 8. 4

Program Prioritas Misi Keempat: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan Penanggulangan Bencana
RPJMD Sumatera Selatan 2013-2018

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
5.1 Terkelolanya kawasan hutan	Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana	Urusan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan • Dinas PU Pengairan • Badan Lingkungan Hidup • BPBD • Balitbangnovd
26.1 Meningkatkan daya dukung DAS Musi dan Pengelolaan DAS terpadu		(1) Program Penguatan Kawasan Hutan	
26.2 Menurunkan emisi karbon dan meningkatnya usaha jasa lingkungan di bidang kehutanan		(2) Program Pembentukan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH	
27.1 Berkurangnya laju penurunan Kualitas Lingkungan Hidup meliputi air, udara dan tutupan lahan		(3) Program Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi	
28.1 Terwujudnya pembangunan rendah karbon		(4) Program Kelembagaan Pengelolaan DAS Terpadu Musi	
29.1 Terselenggaranya partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan LH		(5) Program Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan	
29.2 Terwujudnya ketaatan masyarakat & pelaku usaha kegiatan dalam pengelolaan LH		(6) Program Penurunan Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	
29.3 Meningkatkan kemampuan laboratorium lingkungan dalam		(7) Program Penguatan Kelembagaan Implementasi REDD+ dan RAD GRK	
		(8) Program Peningkatan Target Penanaman Hutan	
		Urusan Pekerjaan Umum	
	(1) Program Pengendalian		

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
<p>pengujian parameter kualitas lingkungan</p> <p>30.1 Berkembangnya manajemen penanggulangan bencana</p> <p>30.2 Berkurangnya kerugian akibat bencana</p> <p>30.3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana</p> <p>30.4 Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana</p>		<p>Banjir</p> <p>(2) Program Pembangunan Talud/Turap dan Bronjong</p> <p>Urusan Lingkungan Hidup</p> <p>(1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan</p> <p>(2) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>Urusan Sosial</p> <p>(1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</p> <p>(2) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</p> <p>(3) Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana</p> <p>(4) Program Tanggap Darurat Bencana</p> <p>(5) Program Peningkatan Balai Pengobatan Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan</p> <p>Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian</p> <p>(1) Program Litbang dan Inovasi Bidang</p>	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
		Sumber Daya Alam dan Lingkungan Kemasyarakatan	
24.1 Tersedianya peraturan penataan ruang di daerah	Pengembangan Wilayah	Urusan Perencanaan Pembangunan (1) Program Perencanaan Tata Ruang (2) Program Pemanfaatan Ruang (3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Setda
24.2 Meningkatnya kualitas produk rencana tata ruang			
24.3 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas program pemanfaatan ruang			
24.4 Penyelesaian Batas Wilayah		Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian (1) Program Penataan Daerah Otonomi Baru	

8.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2014-2018

Penghitungan kerangka pendanaan didasarkan pada kebijakan belanja daerah tahun 2014-2018 sebagai berikut:

- (1) Membiayai belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
- (2) Memenuhi secara bertahap alokasi belanja sebesar 20 persen untuk pembiayaan pendidikan.
- (3) Membiayai program kegiatan yang menjadi prioritas Sumatera Selatan 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- (4) Memenuhi standar pelayanan minimal dan operasional;
- (5) Mengutamakan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan;

8.2.1 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Tahun 2014-2018

Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat tahun 2013-2018 menjadi dasar perhitungan kapasitas riil keuangan daerah sebagai berikut.

Tabel 8. 5

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

No	Jenis Belanja	Proyeksi (Rp. Milyar)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	Belanja Tidak langsung	1,026.33	1,412.68	1,426.80	1,441.07	1,455.49	1,470.04
1	Belanja Pegawai	780.57	804.69	812.73	820.86	829.07	837.36
2	Belanja bagi Hasil Kabupaten/Kota	239.57	600.00	606.00	612.06	618.18	624.36
3	Belanja Tidak Terduga	6.19	7.99	8.07	8.15	8.24	8.32
B	Belanja Langsung	1,251.83	1,264.35	1,276.99	1,289.77	1,302.66	1,315.68
1	Belanja Pegawai (Tunjangan Kinerja, Beasiswa)	67.89	68.57	69.25	69.95	70.65	71.35
2	Belanja Barang dan Jasa	1,183.94	1,195.78	1,207.74	1,219.82	1,232.01	1,244.33
C	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	300.59	893.42	902.36	911.38	920.49	1,429.70
1	Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2	Penyertaan Modal	300.59	893.42	902.36	911.38	920.49	929.70
	Total (A+B+C)	2,578.75	3,570.45	3,606.15	3,642.22	3,678.64	4,215.42

Dengan memperhitungkan proyeksi pendapatan daerah, pembayaran hutang, serta belanja dan pengeluaran pembangunan yang bersifat wajib dan mengikat, proyeksi kapasitas riil keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2014-2018.

Tabel 8. 6

Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

No	Jenis Belanja	Proyeksi (Rp. Milyar)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pendapatan Daerah	6,000.78	7,104.28	8,186.28	9,460.39	11,011.49	12,905.07
2	Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SILPA)	521.33	295.72	200	200	200	200
	Total Penerimaan	6,522.11	7,400.00	8,386.28	9,660.39	11,211.49	13,105.07
	Dikurangi:						
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	300.59	893.42	902.36	911.38	920.49	929.7
	Kapasitas riil keuangan daerah	6,221.52	6,506.58	7,483.92	8,749.01	10,291.00	12,175.37

Dengan memperhatikan kapasitas riil keuangan daerah tahun 2014-2018, distribusi alokasi belanja dikelompokkan menjadi prioritas I, prioritas II, dan prioritas III. Setiap tingkatan prioritas mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas di atasnya terpenuhi.

Prioritas I merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan program unggulan (*dedicated*) Gubernur Sumatera Selatan 2013-2018 sebagaimana dijanjikan pada kampanye Pemilukada. Selain itu, alokasi anggaran juga memuat prioritas nasional dan prioritas belanja wajib yang harus dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari belanja daerah. Prioritas I mengutamakan pelayanan publik, serta memiliki manfaat dan dampak yang tinggi bagi masyarakat.

Prioritas II merupakan program unggulan SKPD yang mempunyai dampak bagi masyarakat sesuai dengan kelompok sasaran. Penetapan prioritas II mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kinerja dan standar pelayanan minimum yang harus dicapai SKPD.

Prioritas III merupakan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.

Tabel 8. 7

**Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018**

No	Jenis Belanja	Proyeksi (Rp. Milyar)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kapasitas Keuangan Daerah	6,522.11	7,400.00	8,386.29	9,660.40	11,211.49	13,105.08
2	Prioritas 1 (Wajib dan Mengikat)	2,578.75	3,570.45	3,606.15	3,642.22	3,678.64	4,215.42
	2.1 Belanja Tidak Langsung	1,026.33	1,412.68	1,426.80	1,441.07	1,455.49	1,470.04
	2.2 Belanja Langsung	1,251.83	1,264.35	1,276.99	1,289.77	1,302.66	1,315.68
	2.3 Pengeluaran pembiayaan daerah	300.59	893.42	902.36	911.38	920.49	1,429.70
3	Kapasitas riil keuangan daerah	4,215.83	4,427.26	4,780.14	6,018.18	7,532.85	8,889.66
4	Prioritas II (Pencapaian Visi dan Misi Gubernur)	1,271.16	1,448.36	2,190.00	3,409.14	4,904.75	6,242.36
	4.1 Prioritas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keamanan dan Ketertiban		109.24	208.18	410.29	421.58	512.00
	4.2 Prioritas Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya		196.76	294.37	310.07	548.68	675.70
	4.3 Prioritas Penanggulangan kemiskinan		387.21	511.45	625.58	878.32	1,106.95
	4.4 Prioritas Pertanian		98.29	159.39	344.22	575.70	707.81
	4.5 Prioritas Infrastruktur dan Energi		558.03	866.16	1,442.32	2,070.23	2,577.16
	4.6 Prioritas Investasi dan Pengembangan usaha		27.23	42.01	127.55	202.84	302.41
	4.7 Prioritas Lingkungan dan Pengendalian Bencana		67.38	102.53	139.11	182.40	320.33
	4.8 Prioritas Pengembangan Wilayah		4.22	5.90	10.00	25.00	40.00
5	Prioritas III	2,944.67	2,978.90	2,590.14	2,609.04	2,628.10	2,647.30
	5.1 Bantuan Hibah	2,118.19	1,800.54	1,400.00	1,407.00	1,414.04	1,421.11
	5.2 Bantuan Sosial	0.6	0.6	0.6	0.61	0.61	0.61
	5.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
	5.4 Belanja Bantuan Keuangan	825.88	1,177.76	1,189.54	1,201.43	1,213.45	1,225.58
6	Surplus/Defisit	-272.47	-597.71	0.00	0.00	0.00	0.00

8.3 Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan untuk Mewujudkan Misi Pembangunan

Rencana program prioritas dan kerangka pendanaan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.